

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT , atas Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah – Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan dan regulasi yang ada.

Adapun maksud dokumen LKJiP ini untuk memberikan laporan yang terkait dengan capaian kinerja dari Bappeda dan sebagai bahan evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja selama tahun 2023. Tujuan dokumen LKJiP memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan kepada para stakeholder yang membutuhkan dan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan pada tahun mendatang.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi atas terselesainya LKJiP khususnya di BAPPELITBANGDA. Namun disisi lain kami menyadari dari apa yang telah selesai ini masih perlu adanya masukan dan saran guna sebagai koreksi untuk perbaikan laporan mendatang.

Pasuruan, 31 Desember 2024



**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASURUAN**

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19741031 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR DIAGRAM.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.....	2
1.4 Isu Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan	8
1.5 Dasar Hukum	8
1.6 Sistematika penulisan.....	11
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Perubahan Renstra, dan Target Perubahan RPJMD Tahun 2022.....	56
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Renstra, 2024-2026	57
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Bappelitbangda dengan Realisasi Nasional...	59
3.1.5 Analisis Keberhasilan/ kegagalan terhadap peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	60
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	62
3.1.7 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan	65
3.2 Realisasi ANggaran	66
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Rekomendasi.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai PNS Menurut Pendidikan, Pangkat dan Eselon per Desember Tahun 2024.....	16
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan....	17
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Gedung BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.....	18
Tabel 1.5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2023.....	19
Tabel 1.6	Identifikasi Permasalahan dan Isu Straegis Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2024-2026.....	20
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Daerah yang berhubungan dengan TUPOKSI BAPPELITBANGDA.....	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2024 BAPPELITBANGDA.....	26
Tabel 3.2	Kertas kerja Keselarasan Antar Dokumen, RPD-Renstra dan RKPD-Renja.....,,	28
Tabel 3.3	Capaian IKU dan IKD 2024.....	35
Tabel 3.4	Tingkat Keselarasan Inovasi Daeah dengan IKU dan IKD Tahun 2024	45
Tabel 3.5	Perkembangan Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022, 2023, 2024.....	56
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah Renstra.....	58
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Bappeda Propinsi Jawa Timur.....	60
Tabel 3.10	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran BAPPELITBANGDA Tahun 2024	61
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	63
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.....	4
------------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dalam memberikan pelayanan publik. Laporan kinerja juga merupakan proses penilaian yang terukur dan menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan kinerja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 ini merupakan capaian tahun pertama dalam periode jangka menengah tahun 2024-2026. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024 beserta perubahannya.

Adapun tujuan penyusunan Laporan kinerja Bappelitbangda Tahun 2024:

1. Memberikan informasi kinerja tahun 2024 yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mengevaluasi kinerja Bappelitbangda sebagai dasar perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

I.3 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasuruan

A. Tugas dan Fungsi

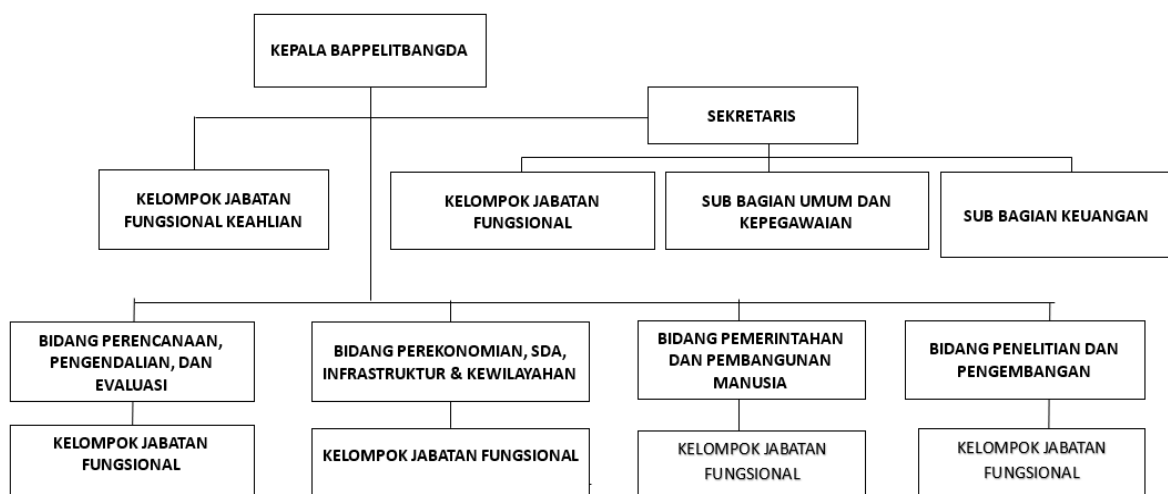
Tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan.

Tugas Bappelitbangda adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bappelitbangda mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan. Bagan struktur organisasi Bappelitbangda sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

C. Kepegawaian, Sarana dan Prasarana

Jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebanyak 54 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 33 orang, PPPK sebanyak 3 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 16 orang. Rincian ASN Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pegawai ASN Menurut Pendidikan, Pangkat dan Eselon per Desember Tahun 2024

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-3	1	Pembina	1	Eselon IIIb	1
S-2	9	Pembina Utama Muda	1	Eselon II	1
		Pembina Tk I	1	Eselon IIIa	1
		Pembina	3	Eselon IIIb	3
		Pembina	2	JF Perencana	2
		Penata Tk. I	1	JF Peneliti	1
		Penata	1	JF Peneliti	1
S-1	17	Penata Tk. I	1	Kasubbag keuangan	1
		Penata	1	Kasubbag Umum	1
		Penata Tk. I	7	JF Perencana	7
		Penata Tk. I	1	JF Perencana	1
		Penata Muda	4	JFU	4
		IX	3	JF Perencana	3
SMA	8	Penata Muda Tk.I	8	JFU	8
Jumlah	35		35		35

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitbangda Kab. Pasuruan Tahun 2024

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagaimana Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

Tabel 1.2
Sarana Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Dinas (mobil)	9 unit
2	Kendaraan Dinas (sepeda motor)	10 unit
3	Komputer	48 unit
4	Laptop	36 unit
5	Netbook	5

No	Uraian	Jumlah
6	Printer	61 unit
7	Plotter	1
8	Scanner	1 unit
9	UPS	26
10	Mesin Ketik Elektronik	3 unit
11	Meja Rapat	22 buah
12	Kursi Rapat	158 buah
13	Kursi Tamu	4 buah
14	Meja Tamu	1
15	Kursi Putar	2 buah
16	Meja Biro	5 buah
17	Meja Komputer	12 buah
18	Sofa	4
19	Kursi Kerja	75
20	Meja Kerja	53 buah
21	Brankas	3 buah
22	Kamera	10 unit
23	LCD Proyektor	9
24	Layar Proyektor	2
25	Microphone	1
26	Telepon	30 unit
27	Mesin Faksimile	4
28	Televisi	1
29	Kaset Recorder	1
30	Sound sistem	1 paket
31	Wireless	1
32	Handycam	5
33	GPS	5 unit
34	Air Conditioner	36 unit
35	Mesin Fotokopi	1 unit
36	Lemari Besi	13 buah
37	Rak Kayu	16 buah
38	Filling Besi/Metal	16 buah
39	Lemari Kaca	2 buah
40	Lemari Kayu	14 buah
41	Lemari Buku Perpustakaan	5 buah

No	Uraian	Jumlah
42	Lemari Peta	1 buah
43	Papan Visuil	1 buah
44	Alat Penghancur Kertas	3 buah
45	Papan Pengumuman	14 buah
46	Mesin Absensi	1 buah
47	Papan Panel	1

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2024

Tabel 1.3
Prasarana Gedung Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kaban	1	Ruang
2	Ruang Sekretaris	1	Ruang
3	Ruang Bidang	4	Ruang
4	Ruang Rapat	2	Ruang
5	Ruang Sekretariat	1	Ruang
6	Ruang Gudang	1	Ruang
7	Loby	1	Ruang
8	Musholla	1	Ruang
9	Dapur kering	1	Ruang
10	Dapur basah	1	Ruang
11	Toilet / Kamar Mandi	4	Ruang

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, Tahun 2024

1.4 Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dan diantisipasi dalam jangka menengah. Identifikasi permasalahan dan isu strategis tersebut sebagaimana tabel Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Jangka Menengah
Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

No	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1.	Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan Koordinasi belum bisa	Belum menerapkan perencanaan dengan menggunakan metode THIS	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah • Belum optimalnya kualitas

No	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
	optimal dikarenakan sistem komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan belum terbangun dengan baik		perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial
2.	Belum optimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah	Data dan Informasi yang belum tervalidasi	Belum optimalnya data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
3.	Belum optimalnya penerapan hasil kelitbang dalam pengambilan keputusan.	Hasil – hasil penelitian yang dikaitkan dengan pembangunan di Kabupaten pasuruan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan perencanaan	Belum sepenuhnya rekomendasi hasil perencanaan serta kelitbang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
4.	Inovasi Daerah belum dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup	Hasil inovasi masih belum menunjukkan kenaikan signifikan terhadap pelayanan public, maupun memberikan manfaat	Penciptaan, penerapan dan pengembangan inovasi daerah terus dilakukan diantaranya melalui kompetisi ide gagasan inovasi sebagai langkah awal dalam mendorong terciptanya inisiatif inovasi daerah,

1.5 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
9. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 00.7.26/1113/HK424.013/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024.

1.6 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu jangka menengah dengan menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. RPD disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pada masa transisi sampai dengan terpilihnya Bupati/Wakil Bupati periode 2025-2029 hasil pemilukada tahun 2024. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan mendukung tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026, khususnya pada tujuan **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi** dengan dasaran **Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel**.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPD yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
			2024	2025	2026
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	68,04	69,52	71 (BB)
		Nilai SAKIP	80,0 (A)	81,40 (A)	82,50(A)

Adapun ringkasan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025	2026
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24,92	25,30	25,69
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24,82	25,11	25,40
Sasaran :				

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025	2026
1. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100
	Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah (%)	100	100	100
	Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target (%)	36,80	36,50	36,00
	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah (%)	100	100	100
2. Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Tingkat keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD (%)	100	100	100
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	87	88

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan penetapan target yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran. Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024 dan dilakukan perubahan di bulan November terdapat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	24,92
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	24,82
1.1	Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	persen	100

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	persen	100
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	persen	36,80
		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	persen	100
1.2	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	persen	100
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	-	86

Secara lengkap dokumen perjanjian kinerja (perubahan) eselon II (Kepala Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebagaimana tersebut pada Lampiran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil pengukuran tersebut memberi gambaran tercapai/tidaknya target beserta penjelasan yang cukup memadai, sebagai bahan evaluasi kinerja tahun berikutnya. Uraian capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasuruan di tahun 2024 dapat digambarkan melalui Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realiasi	Capaian
1.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	24,92	24,04	96,46%
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	-	24,82	23,97	96,57%
1.1	Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	persen	100	95,36	95,36%
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	persen	100	108,45%	105.86,%
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	persen	36,80	25%	147%
		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	persen	100	97,50	97,50%
1.2	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	persen	100	100	100%

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realiasi	Capaian
	kinerja pembangunan daerah					
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP OPD	-	85	84,95	99,94%

Capaian Indikator Kinerja Utama pada tabel 3.1 Bappelitbangda pada tahun 2024 menjelaskan secara keseluruhan menunjukkan tingkat capaian yang baik dengan rata-rata capaian sebesar 102,99%.

A. Indikator Tingkat keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat keselarasan antara Renstra dan RPD (Nilai-1) (bobot 0,5) dengan kriteria:
 - Selaras pada Tujuan Renstra dengan Sasaran RPJMD (0,25)
 - Konsistensi Program (0,25)
 - Konsistensi Indikator Kinerja Program (0,25)
 - Konsistensi Indikator Kinerja Program (0,25)
2. Tingkat keselarasan antara Renja dan RKPD (Nilai-2) (bobot 0,5) dengan kriteria:
 - Konsistensi Program/Kegiatan/subKegiatan (0,3)
 - Konsistensi Indikator Program/Kegiatan/subKegiatan (0,4)
 - Konsistensi Target Indikator Program/Kegiatan/subKegiatan (0,3)

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dihitung dengan formulasi :

$$T. Keselarasan = \frac{\text{Jumlah (Nilai - 1 + Nilai - 2) masing - masing PD}}{\text{Jumlah seluruh PD}}$$

Hasil perhitungan realisasi indikator Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

$$Tk. Keselarasan = \frac{\text{Jumlah (Nilai - 1 + Nilai - 2) masing - masing PD}}{\text{Jumlah seluruh PD}}$$

$$= \frac{5245}{55} = 95,36\%$$

Realisasi indikator ini jika dibandingkan target nilainya masih di bawah target dengan capaian 95,36%.

Rincian perhitungan tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan masing-masing perangkat daerah sebagaimana Tabel 3.2. Berdasarkan tabel tersebut nilai tingkat keselarasan dokren PD dengan dokren Pemda berada pada angka 84% sampai dengan 100% dengan rata-rata 95,36%. Kriteria yang belum optimal pada 'konsistensi penetapan target indikator kinerja Program antara Renstra dengan RPJMD' dan 'konsistensi penetapan target indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan antara Renja dengan RKPD'.

B. Indikator Tingkat Capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tingkat capaian IKU dan IKD diukur dengan menghitung rerata capaian semua IKU dan IKD. IKU dan IKD dimaksud sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD. Capaian IKU dan IKD diperoleh dengan membandingkan antara realisasi terhadap target IKU dan IKD berdasarkan perjanjian kinerja Bupati dan RKPD.

Perhitungan realisasi Tingkat capaian IKU dan IKD menggunakan formulasi:

$$\text{Tingkat capaian IKU dan IKD} = \frac{\text{Jumlah Capaian masing-masing IKU dan IKD}}{\text{Jumlah capaian seluruh IKU dan IKD}}$$

Penjelasan :

Capaian = perbandingan Realisasi kinerja dengan Target

Target IKU sesuai PK Bupati

Target IKD (IKK) sesuai RKPD

Hasil perhitungan realisasi indikator capaian IKU dan IKD berdasarkan formula tersebut:

$$\begin{aligned} &= 15074,70\% / 132 \\ &= 105,86\% \end{aligned}$$

Dari IKU dan IKD yang ada sejumlah 132 indikator, terdapat 5 indikator yang belum tersedia data realisasi tahun 2024. Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan target menunjukkan nilai di atas (melebihi target) dengan capaian 105,86%.

Secara rinci perhitungan Capaian IKU dan IKD dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2
Kertas kerja Keselarasan Antar Dokumen, RPD-Renstra dan RKPD-Renja

No	PD	var1/subvar/bobot				Nilai Var1	var2/subvar/bobot			Nilai Var2	Tingkat Keselarasan (%)
		renstra-rpjmd					renja-rkpd				(Nilai Var1 + Nilai Var2) * 100
		0,5					0,5				
		tujuan renstra-sasaran rpjmd	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program		Konsistensi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Konsistensi IK Prog/ Kegiatan/ subkegiatan	Konsistensi Target IK Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (dg catatan*)		
		0,25	0,25	0,25	0,25		0,3	0,4	0,3		
		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		
1	DINAS P DAN K	1	1	1	1	0,5	1	1	0,75	0,4625	96,25
2	DINAS KESEHATAN	1	1	1	0,75	0,46875	1	1	1	0,5	96,875
3	SATPOL	1	1	1	0,75	0,46875	1	0,75	1	0,45	91,875
4	DINAS SOSIAL	1	1	1	0,75	0,46875	1	1	0,75	0,4625	93,125
5	DISNAKER	1	0,75	0,75	0,75	0,40625	1	1	1	0,5	90,625
6	DP3P2KB	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
7	DISPENDUKCAPIL	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
8	DPMD	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
9	DISPORA	1	1	1	0,75	0,46875	1	1	0,75	0,4625	93,125
10	DINAS PERPUSIP	1	1	1	0,75	0,46875	1	1	1	0,5	96,875
11	SETA	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
12	SEKRETARIAT DPRD	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75

No	PD	var1/subvar/bobot				Nilai Var1	var2/subvar/bobot			Nilai Var2	Tingkat Keselarasan (%)
		renstra-rpjmd					renja-rkpd				(Nilai Var1 + Nilai Var2) *100
		0,5					0,5				
		tujuan renstra-sasaran rpjmd	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program		Konsistensi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Konsistensi IK Prog/ Kegiatan/ subkegiatan	Konsistensi Target IK Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (dg catatan*)		
		0,25	0,25	0,25	0,25		0,3	0,4	0,3		
		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		
13	BAPPELITBANGDA	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100,00
14	BKPSDM	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
15	INSPEKTORAT	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
16	BAKESBANGPOL	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
17	KEC GEMPOL	1	1	1	1	0,5	1	1	0,75	0,4625	96,25
18	KEC BANGIL	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
19	KEC REMBANG	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
20	KEC PRIGEN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
21	KEC POHJENTREK	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
22	KEC GD.WETAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
23	KEC WINONGAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
24	KEC REJOSO	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
25	KECAMATAN GRATI	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
26	KECAMATAN LEKOK	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
27	KEC NGULING	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90

No	PD	var1/subvar/bobot				Nilai Var1	var2/subvar/bobot			Nilai Var2	Tingkat Keselarasan (%)
		renstra-rpjmd					renja-rkpd				(Nilai Var1 + Nilai Var2) *100
		0,5					0,5				
		tujuan renstra-sasaran rpjmd	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program		Konsistensi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Konsistensi IK Prog/ Kegiatan/ subkegiatan	Konsistensi Target IK Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (dg catatan*)		
		0,25	0,25	0,25	0,25		0,3	0,4	0,3		
		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		
28	KEC SUKOREJO	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
29	KEC PASREPAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
30	KEC PANDAAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
31	KEC TOSARI	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
32	KEC PURWOSARI	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
33	KEC PURWODADI	1	1	1	1	0,5	1	1	0,75	0,4625	96,25
34	KEC LUMBANG	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
35	KEC KRATON	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
36	KEC TUTUR	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
37	KEC BEJI	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	1	0,5	93,75
38	KEC PUSPO	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
39	KEC KEJAYAN	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
40	KEC WONOREJO	1	1	1	0,5	0,4375	1	1	0,75	0,4625	90
41	DINAS SDA-CK-TR	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
42	DINAS BMBK	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
43	DINAS PERKIM	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
44	BPBD	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100

No	PD	var1/subvar/bobot				Nilai Var1	var2/subvar/bobot			Nilai Var2	Tingkat Keselarasan (%)
		renstra-rpjmd					renja-rkpd				(Nilai Var1 + Nilai Var2) *100
		0,5					0,5				
		tujuan renstra-sasaran rpjmd	Konsistensi Program	Konsistensi IK Program	Konsistensi Target IK Program		Konsistensi Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Konsistensi IK Prog/ Kegiatan/ subkegiatan	Konsistensi Target IK Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (dg catatan*)		
		0,25	0,25	0,25	0,25		0,3	0,4	0,3		
		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)	(nilai Max = 1)		
45	DINAS KP DAN PERTANIAN	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
46	DLH	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
47	DISHUB	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
49	DISKOP-UKM	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
50	DPMPSTP	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
51	DINAS PERIKANAN	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
52	DINAS PARIWISATA	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
53	DISNAK DAN KESWAN	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
54	DISPERINDAG	1	1	1	1	0,5	0,5	0,75	0,75	0,3375	84
55	BPKPD	1	1	1	1	0,5	1	1	1	0,5	100
JUMLAH											5.245

Tabel 3.3
Capaian IKU dan IKD Tahun 2024

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
IKU					
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,86	5,39	91,98%
2	Indeks Gini		0,31	0,251	119,03%
3	Indeks Wiliamson		0,25	0,269	92,40%
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,42	8,63	97,51%
5	Indeks Reformasi Birokrasi		68,68	n/a	
6	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	Rp	5.971.224.900	n/a	
7	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Rp	72.486.250.100	n/a	
8	Pendapatan Perkapita	Rp	117.640.000	116.170.000	98,75%
9	Nilai Investasi Daerah	Rp	12.247.180.000.000	12.964.748.125.701	105,86%
10	Indeks Infrastruktur Wilayah		47,27	29,84	63,13%
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		62,54	64,47	103,09%
12	Indeks Resiko Bencana		106,27	109,38	97,07%
13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,82	72,38	102,20%
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,22	n/a	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,48	5,02	108,39%
16	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61,5	62,1	100,98%
17	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,87	80,31	100,55%
18	Nilai SAKIP		80,3	76,74	95,57%
19	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100,00%
20	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71,3	77,32	108,44%
21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Indeks	2,5	3,88	155,20%
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	93	93,41	100,44%
IKD					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	89,4	87,28	97,63%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	94,1	98,9	105,10%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	84,2	82,49	97,97%

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	12,6	57,33	455,00%
5	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	7,7	100	140.252,45
6	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,0713	0,0773	108,42%
7	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100,00%
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100,78	100,78%
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100,09	100,09%
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	92,65	92,65%
11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,5	104,41	103,89%
12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	111,17	111,17%
13	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar	Persen	100,07	100	99,93%
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	97,82	97,82%
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100,00%
16	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100,73	100,73%
17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100,00%
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	102,19	102,19%
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pengobatan	Persen	100	113,37	113,37%

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	74,9	76,15	101,67%
21	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Persen	88,41	73,7	83,36%
22	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81,82	69,06	84,40%
23	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Rasio	31,76	68,85	216,78%
24	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	79,9	80,76	101,08%
25	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	35	35	100,00%
26	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	100,00%
27	Penyediaan dan rehabilitasi rumahlayak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	100	100	100,00%
28	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab yg ditangani	Persen	21,19	18,39	86,79%
29	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	4,87	4,41	90,55%
30	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100	100	100,00%
31	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100,00%
32	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	29,03	29,03%
33	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100,00%
34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100,00%

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100,00%
36	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	40,15	40,15%
37	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	100	100	100,00%
38	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Persen	78	100	128,21%
39	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen	100	100	100,00%
40	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	70,55	70,55	100,00%
41	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	94	94,3	100,32%
42	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	128.487.176	137.810.689	107,26%
43	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	9,58	24	250,52%
44	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	41	52	126,83%
45	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	23,1	23,18	100,35%
46	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	0,01	0,018	180,00%
47	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	9,2	6,02	134,57%
48	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	101,56	89,4	88,03%

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
49	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas umum	Persen	100	100	100,00%
50	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	4,8	48,80	1.017%
51	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	m2	1.000,21	16.600	1.659,65%
52	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Sengketa	3	1	33,33%
53	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Persen	45	72,29	160,64%
54	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	52	19,64	37,77%
55	Perekaman KTP Elektronik	Persen	98,82	100	101,19%
56	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	35	45,63	130,37%
57	Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang Mempunyai Akte Kelahiran	Persen	87,5	91,72	104,82%
58	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	12,73	12	94,27%
59	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	100	100	100,00%
60	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	28,79	1,72	5,97%
61	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,98	n/a	
62	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	73,7	76,3	103,53%
63	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	12,8	3,5	172,66%
64	Rasio Konektivitas	Rasio	42	48,48	115,43%
65	Kinerja Lalu lintas Kabupaten/kota	Persen	0,35	0,36	102,86%

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
66	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	70	100	142,86%
67	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	38	14,54	38,26%
68	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	21,7	25,1	115,67%
69	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	22,81	24,46	107,23%
70	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,18	0,32	177,78%
71	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan	Persen	1,01	5,3	524,75%
72	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,13	58,17	447,48%
73	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9	12,66	140,67%
74	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	20	37,64	188,20%
75	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	62	100	161,29%
76	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	62	100	161,29%
77	Tingkat keamanan informasi Pemerintah	Persen	62,02	49,92	80,49%
78	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	7,7	100	1298%
79	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	85	74,33	87,45%
80	indeks pembangunan literasi masyarakat	Persen	8,6	12,51	145,47%

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
81	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	78	75	96,15%
82	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	16,77	16,66	99,34%
83	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	44.340	47.666	107,50%
84	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	20	20	100,00%
85	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	20	20	100,00%
86	Tingkat hunian akomodasi	Persen	51	100	196%
87	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp	31.440.583	3.722.427	11,84%
88	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	741.367.000	885.793.000,00	119,48%
89	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Tanaman Pangan				
	a. Padi	Ton/Ha	6,07	6,276	103,39%
	b. Jagung	Ton/Ha	6,46	6,636	102,72%
	c. Kedelai	Ton/Ha	1,92	3,28	170,83%
	d. Tanaman Buah Tahunan	Ton/Ha	90,8	286,39	315,41%
	e. Tanaman Sayur	Ton/Ha	36,13	68,826	190,50%
	f. Tanaman Hias	Ton/Ha	20,18	72,94	361,45%
90	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	1	8,5	850,00%
91	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	97,73	106,78	109,26%
92	Pertambahan jumlah industri kecil dan	Persen	9,9	95,83	

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
	menengah di Kabupaten/Kota				
93	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Persen	30	30	100,00%
94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	80	80,00%
95	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	100,00%
96	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	17	n/a	
97	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	55	34,09	61,98%
98	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	10	-10,48	-104,80%
99	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio			
	a. Pendidikan Tinggi	Persen	66,65	56,02	84,05%
	b. Menengah	Persen	29,39	39,26	133,58%
	c. Dasar	Persen	4,26	4,72	110,80%
100	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru, dan tenaga kesehatan)	Persen	13,13	14,87	113,25%
101	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	43,79	21,66	49,46%
102	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	9,17	7,73	84,30%
103	Rasio PAD	Persen	20,04	23,84	118,96%
104	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	77,08	68,26	88,56%

No	IKU/IKD	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian
105	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-7,86	-9,86	74,55%
106	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1,5	3,46	230,67%
107	Manajemen Aset	komponen	2.74	4	145,99%
108	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	1,98	50,10%	2530%
109	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		level 3	level 3	100,00%
110	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		level 3	level 3	100,00%
				Jumlah Capaian	15074,70%

C. Indikator Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target.

Perhitungan indikator 'persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target' menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah IKU dan IKD yg tidak mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh IKU dan IKD}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Target IKU dan IKD (IKK) sesuai RKPD

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui jumlah IKU dan IKD yang targetnya tercapai sebanyak 98 indikator, target tidak tercapai sebanyak 34 indikator, dan belum ada data sebanyak 5 indikator. Sehingga persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target diperoleh nilai :

$$\text{Jml IKU dan IKD yg tdk mencapai Target} = \frac{34}{132} \times 100\% = 25,00\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut (25%), maka target untuk Indikator 'Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target' mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan 36,80% atau dengan capaian sebesar 147%.

D. Indikator Tingkat Keselarasan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah diukur dengan menilai keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD dan keselarasan antara

RKPD dengan RPJMD. Masing-masing keselarasan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD (bobot 0,5)
 - a. Keselarasan Visi/Misi RPJMD dengan Arah Kebijakan RPJPD (bobot 1)
2. Keselarasan RKPD dengan RPJMD (bobot 0,5)
 - a. Tema RKPD dengan Arah Kebijakan RPJMD (bobot 0,25)
 - b. Konsistensi Program (bobot 0,25)
 - c. Konsistensi IK Program (bobot 0,25)
 - d. Konsistensi Target IK Program (bobot 0,25) (catatan: untuk tahun pertama, untuk tahun berikutnya memperhatikan realisasi tahun sebelumnya)

Perhitungan realisasi indikator 'Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah' menggunakan formula:

Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah = (Nilai keselarasan RPJMD-RPJPD + Nilai keselarasan RKPD-RPJMD) x 100%

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun/tersedia di tahun 2024 yaitu: RPJPD 2025-2029, RPD 2024-2026, RPJMD teknokratik 2025-2029, dan RKPD 2025. Berdasarkan kondisi tersebut dan penjelasan pengukuran keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. RPJMD teknokratik 2025-2029 memuat kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, serta rekomendasi kinerja dan kerja. Sedangkan RPD 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program. RPJMD teknokratik 2025-2029 dan RPD 2024-2026 tidak memuat visi-misi Bupati sehingga keselarasan dokumen RPJMD teknokratik dan RPD dengan arah kebijakan RPJPD 2025-2029 tidak dapat diukur/dinilai. Sehingga untuk penilaian tahun 2024 menggunakan dokumen RPJPD 2005-2025 dan Perubahan RPJMD 2018-2023.
2. Penilaian keselarasan RKPD tahun 2025 dilakukan terhadap dokumen RPD 2024-2026.

Perhitungan tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel 3.4. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 97,50%. Apabila dibandingkan dengan target 100% maka tidak mencapai target atau dengan capaian 97,50%. Faktor yang mempengaruhi adalah adanya kemungkinan setiap tahun terjadi pemutakhiran nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan yang memungkinkan juga berdampak pada perubahan indikator dan targetnya.

Tabel 3.4
Kertas Kerja Perhitungan Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Keselarasan RPJMD dengan RPJPD (0,5)				Keselarasan RKPD dengan RPJMD (0,5)						Total Nilai	
Arah Kebijakan RPJPD 2008-2025 (2020-2025)	Visi-Misi RPJMD 2018-2023	Penilaian	Nilai keselarasan (Nilai- 1)	Tema RKPD dengan Arah Kebijakan RPJMD (0,25)			Konsistensi Program (0,25)	Konsistensi IK Program (0,25)	Konsistensi Target IK Program (th I, th selanjutnya menyesuaikan realisasi n-1) (0,25)	Nilai Keselarasan (Nilai-2)	Nilai 1 + Nilai 2
		nilai max=1		Arah Kebijakan RPD th 2025	Tema RKPD 2025	Penilaian (max=1)	Penilaian (max=1)	Penilaian (max=1)	Penilaian (max=1)		
mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat	VISI = Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing	1	0,5	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif	1	1	0,9	0,9	0,475	0,975
pelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan							<i>Ket = perubahan nomenklatur subkegiatan, memungkinkan terjadi perubahan indikator program</i>	<i>Ket = Perubahan indikator program memungkinkan perubahan target</i>		
terciptanya nilai tambah pada sektor ekonomi dan daya saing industri.	mewujudkan kohesi sosial.										

Keselarasan RPJMD dengan RPJPD (0,5)				Keselarasan RKPD dengan RPJMD (0,5)							Total Nilai
	peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan										
	tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis										
	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan										

E. Indikator Tingkat Keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU dan IKD

Tingkat keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU dan IKD dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Tingkat keselarasan INODA dan IKU/IKD} = \frac{\text{Jumlah INODA yg mendukung IKU dan IKD}}{\text{Jumlah Inovasi Daerah Tahun 2024}} \times 100\%$$

Keterangan:

Inoda = Inovasi daerah, berdasarkan SK Bupati tentang inovasi daerah

IKU dan IKD berdasarkan dokumen RPD 2024-2026

Kertas kerja perhitungan keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD sebagaimana tabel 3.5.

Tabel 3.5
Kertas Kerja Keselarasan Inovasi Daerah dengan IKU Dan IKD
Tahun 2024

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
1	Kemisan Mesra (Aplikasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Masyarakat Sejahtera)	Aplikasi Kemisan Mesra lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indek Gini (IKU)
2	Lomba Inopamas (Inovasi dan Teknologi Pasuruan Maslahat)	Aplikasi Lomba Inopamas lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indek williamson (IKU)
3	GEMAJANTRA (Gemar Makan Jajanan Tradisional)	Aplikasi GEMAJANTRA lingkup pelayanannya UPT	Indek williamson (IKU)
4	PINKOPERUMIK (Pusat Inovasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil)	Aplikasi PINKOPERUMIK lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Pertumbuhan Ekonomi (IKU)
5	Lumbang Dekat (Layanan Umkm Berkembang Melayani Desa, Perkantoran, Dan Masyarakat)	Aplikasi LUMBANG DEKAT lingkup pelayanannya Kecamatan Lumbang	Pertumbuhan ekonomi (IKU)
6	BEJI BEJO (BEJI Baik Ekonominya Jaya Orangnya)	Aplikasi BEJI BEJO lingkup pelayanannya Kecamatan Beji	Pertumbuhan Ekonomi (IKU)
7	Angin Dewi (Keuangan Inklusif Desa Wisata)	Aplikasi Angin Dewi lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Pertumbuhan ekonomi (IKU)
8	Cukur Kapas (Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Pasuruan)	Aplikasi Cukur Kapas lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Pertumbuhan ekonomi (IKU)
9	Cangkuler (Pemanfaatan Cangkang Telur Untuk Kuliner)	Aplikasi Cangkuler lingkup pelayanannya UPT	Pertumbuhan ekonomi (IKU)
10	Kopyah Ludes (Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan dan Desa)	Aplikasi Kopyah Ludes lingkup pelayanannya Kecamatan Pandaan	Indeks Reformasi Birokrasi (IKU)
11	SIRUPAWAN (Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan)	Aplikasi SIRUPAWAN lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Infrastruktur Wilayah

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
12	OMAHKU PASURUAN (Satu Peta Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan)	Aplikasi OMAHKU PASURUAN lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Infrastruktur Wilayah (IKU)
13	Insentifku (Informasi Edukasi Terampil Keluarga Pasien RSUD Bangil)	Aplikasi Insentifku lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
14	"Cekatan" (Cepat Tanggap Anggun)	Aplikasi "Cekatan" lingkup pelayanannya Kecamatan Tukur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
15	BATU LUMBANG (Bersih dan Asri, TULUs, Mudah, Berakhlak, Adil, Nyaman, dan Good service)	Aplikasi BATU LUMBANG lingkup pelayanannya Kecamatan Lumbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
16	PURWODADI JUDES (PURWODADI NARIK PAJAK JUJUG DESO)	Aplikasi PURWODADI JUDES lingkup pelayanannya Kecamatan Purwodadi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
17	DARI SUZI KE MASPUR (StanDARIsasi Surat iZIn Keramaian MASyarakat Purwodadi)	Aplikasi DARI SUZI KE MASPUR lingkup pelayanannya Kecamatan Purwodadi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
18	Stand In Mai Dadi (Stand In My Dady)	Aplikasi Stand In Mai Dadi lingkup pelayanannya Kecamatan Purwodadi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
19	INTAN PERMATA (Inovasi Kesehatan Pemeriksaan Terpadu untuk Masyarakat Penyakit Tidak Menular)	Aplikasi INTAN PERMATA lingkup pelayanannya Kecamatan Rejoso	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
20	Lapak Santri (Lapor Pajak secara Mandiri)	Aplikasi Lapak Santri lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
21	Layanan Izin Usaha Jemput Bola (Layanan Perizinan Usaha Keliling di Kecamatan)	Aplikasi Layanan Izin Usaha Jemput Bola lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
22	JALAN PINTAS (Jaringan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas)	Aplikasi JALAN PINTAS lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)
23	RTH Si UNTUNG (Ruang Terbuka Hijau Sarana Edukasi Umum dan Pelestarian Lingkungan)	Aplikasi RTH Si UNTUNG lingkup pelayanannya Kecamatan Wonorejo	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU)
24	DIGIBAST (DIGITALISASI BANK SAMPAH TERPADU)	Aplikasi DIGIBAST lingkup pelayanannya Kecamatan Purwodadi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU)
25	PEMBRITOJA (Pembuatan Briket dari Tongkol Jagung)	Aplikasi PEMBRITOJA lingkup pelayanannya UPT	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU)
26	BUNCIRING (Sabun Cuci Piring Ramah Lingkungan)	Aplikasi BUNCIRING lingkup pelayanannya UPT	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU)
27	GEMABYUR (Gemar Makan Buah dan Sayur)	Aplikasi GEMABYUR lingkup pelayanannya UPT	Indeks Ketahanan Pangan (IKU)
28	SI BORA DUTA CINTA (Aksi Kolaborasi Dukung Pekerja Wanita Ciptakan Kesehatan dan Produktifitasnya)	Aplikasi SI BORA DUTA CINTA lingkup pelayanannya Kecamatan Gondangwetan	Indeks Pembangunan Gender (IKU)

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
29	BATIK WANGI SEKAR SARI (Bangil Cantik, Wanita Aktif Giat Skrining Kanker dan Sadari)	Aplikasi BATIK WANGI SEKAR SARI lingkup pelayanannya Kecamatan Bangil	Indeks Pembangunan Gender (IKU)
30	Srikandi Tumbas Emas (Wanita-wanita hebat Turun bersama melayani masyarakat)	Aplikasi Srikandi Tumbas Emas lingkup pelayanannya Kecamatan Tukur	Indeks Pembangunan Gender (IKU)
31	KIC PELITA (Kelas Ibu Cerdas "PEDULI IBU HAMIL DAN BALITA)	Aplikasi KIC PELITA lingkup pelayanannya Kecamatan Rejoso	Indeks Pembangunan Gender (IKU)
32	POSYANDU ANTIK (Posyandu Ramah Anak, Multi Pelayanan, dan Komprehensif)	Aplikasi POSYANDU ANTIK lingkup pelayanannya Kecamatan Rejoso	Indeks Pembangunan Keluarga (IKU)
33	KELOMPOK DONOR DARAH "SEHATI" (Kelompok Donor Darah "Selamatkan Ibul Hamil dan Bayi)	Aplikasi KELOMPOK DONOR DARAH "SEHATI" lingkup pelayanannya Kecamatan Rejoso	Indeks Pembangunan Keluarga (IKU)
34	Rindu Kasih Bunda (Relaksasi dan Edukasi Laktasi Bunda Menyusui)	Aplikasi Rindu Kasih Bunda lingkup pelayanannya Kecamatan Pohjentrek	Indeks Pembangunan Keluarga (IKU)
35	GADIS DG RUMPI ABG (Gerakan Anak Desa Indonesia Sehat dg Rumpi Anak Baru Gedhe)	Aplikasi GADIS DG RUMPI ABG lingkup pelayanannya Kecamatan Winongan	Indeks Pembangunan Keluarga (IKU)
36	Placak Si Antar Patas (Pusat Layanan Cepat Atasi Kasus Stunting, Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas)	Aplikasi Placak Si Antar Patas lingkup pelayanannya Kecamatan Kraton	Indeks Pembangunan Keluarga (IKU)
37	Pantas (Paket Tuntas (Pembinaan Kader Asuh Secara Terpadu Timbang dan Ukur Stunting Setiap Bulan))	Aplikasi Pantas lingkup pelayanannya Kecamatan Kraton	Indeks Pembangunan Keluarga (IKU)
38	PANGGUNG GEMBIRA ANAK (Panggung Gembira Anak Tk Di Radio Suara Pasuruan)	Aplikasi PANGGUNG GEMBIRA ANAK lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Keluarga (IKU)
39	Cek Kompresor ((C)angkruan (E)dukasi dan (K)onsultasi (KOM)unitas (P)elaku Be(RE)siko (S)ehat Ber(S)ama (OR)ang sekitar)	Aplikasi Cek Kompresor lingkup pelayanannya Kecamatan Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
40	Bengkura Mas (Bebaskan Nguling dari Kusta Mandiri bersama Masyarakat)	Aplikasi Bengkura Mas lingkup pelayanannya Kecamatan Nguling	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
41	Koran HD (Kontrol Jumlah Cairan dan Kondisi Pasien Hemodialisis)	Aplikasi Koran HD lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
42	Hepikol Spesialis Siaga (Hospital Emergensi Privat Konsultasi Spesialis Siaga)	Aplikasi Hepikol Spesialis Siaga lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
43	MC-Trabas (Medical Certificate Tracking Bangil System)	Aplikasi MC-Trabas lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
44	Stroke Holistik (Prahospital, Terapi Fibrilolitik dan Komprehensif)	Aplikasi Stroke Holistik lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
45	Sister Peri (Sistem Terpadu Pelayanan Geriatri)	Aplikasi Sister Peri lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
46	MUFA (Murrotal For Anxiety)	Aplikasi MUFA lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
47	SERUNTING (Akselerasi Penurunan Stunting)	Aplikasi SERUNTING lingkup pelayanannya Kecamatan Gondangwetan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
48	GERDU RAMAH (Gerakan Edukasi, Diskusi Remaja dan Anak untuk menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan remaja anak dalam membentuk karakter remaja dan anak yang berkualitas)	Aplikasi GERDU RAMAH lingkup pelayanannya Kecamatan Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
49	TARI BEPENG (Tanggap Resiko Bencana, Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kecamatan Bangil)	Aplikasi TARI BEPENG lingkup pelayanannya Kecamatan Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
50	Risoles Sapi Rasa Ketan (Mencari Solusi Sambil Minum Kopi Ramah dan Santai Di Kecamatan)	Aplikasi Risoles Sapi Rasa Ketan lingkup pelayanannya Kecamatan Sukorejo	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
51	Ceting Kelor (Cegah Stunting dengan Kolaborasi Lintas Sektor)	Aplikasi Ceting Kelor lingkup pelayanannya Kecamatan Sukorejo	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
52	Suling Emas (Solusi Inovatif Puskesmas Nongkojajar Keliling untuk Edukasi Masyarakat)	Aplikasi Suling Emas lingkup pelayanannya Kecamatan Tukur	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
53	Gerduting (Gerakan Peduli Stunting)	Aplikasi Gerduting lingkup pelayanannya Kecamatan Tukur	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
54	POSTIK (Posyandu Tematik Stunting)	Aplikasi POSTIK lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
55	SURYAMAS JELITA (Sehat Untuk Berkarya Mandiri Bersama Masyarakat Jaga Eliminasi Kusta)	Aplikasi SURYAMAS JELITA lingkup pelayanannya Kecamatan Grati	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
56	SING ELING SADULURAN (Silaturahmi Keliling Desa dan Kelurahan)	Aplikasi SING ELING SADULURAN lingkup pelayanannya Kecamatan Grati	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
57	Permen Manis (Permainan dan edukasi dalam rangka penurunan stunting)	Aplikasi Permen Manis lingkup pelayanannya Kecamatan Tukur	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
58	Gelatik Miber (Gerakan Literasi Keterampilan Menulis dan Berbicara)	Aplikasi Gelatik Miber lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
59	PLK (Pembelajaran Luar Kelas)	Aplikasi PLK lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
60	Si Dadu (Kreasi Kudapan Posyandu)	Aplikasi Si Dadu lingkup pelayanannya Kecamatan Kraton	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
61	GOOD MORNING DOKTER & NAKES (Talkshow Bersama Dokter dan Nakes)	Aplikasi GOOD MORNING DOKTER & NAKES lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
62	RAISA MERINDU (Gerakan Periksa IVA (Inspeksi Visual Asetat) Sadanis (Periksa Payudara Klinis secara Mobile Cegah Kanker Serviks dan Payudara di Posbindu)	Aplikasi RAISA MERINDU lingkup pelayanannya Kecamatan Bangil	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
63	MENCARI SUAMI PENTING (Memantai Calon Pengantin Risiko Tinggi Supaya AKI AKB Minimal juga Penurunan Stunting)	Aplikasi MENCARI SUAMI PENTING lingkup pelayanannya Kecamatan Gempol	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
64	GERBANG PENDEKAR SANTRI (Gerakan Pengembangan Pendidikan Etika dan Karakter, Santun, Terpuji dan Religius)	Aplikasi GERBANG PENDEKAR SANTRI lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
65	GETARVOS (Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Vokasi)	Aplikasi GETARVOS lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
66	PPL (Podcast Dalam Peningkatan Literasi)	Aplikasi PPL lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
67	E-Presiba (E-Presensi Siswa (Yang berdampak))	Aplikasi E-Presiba lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
68	E-Monbelar (Elektronik Monitoring Pembelajaran Harian)	Aplikasi E-Monbelar lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
69	GARASI BIG (Gerakan Numerasi di Pelajaran Bahasa Inggris)	Aplikasi GARASI BIG lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
70	JAHE SPAGETI (Jamu Herbal SMP Gempol Tiga)	Aplikasi JAHE SPAGETI lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
71	PC "X" SS165 (Passion Class "X" Satria Spenda 165)	Aplikasi PC "X" SS165 lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
72	KOMIK BELATI SS 165 (Komunitas Inovasi Kreasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informatika Satria Spenda 165)	Aplikasi KOMIK BELATI SS 165 lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
73	GISI SS165 (Giat Literasi Satria Spenda 165)	Aplikasi GISI SS165 lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
74	GENTA (Gerakan Cinta Alquran)	Aplikasi GENTA lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
75	SAKERA APP (Sistem Aplikasi Kinerja dan Pembelajaran)	Aplikasi SAKERA APP lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
76	GESITE APP (Gemar Literasi Terpadu)	Aplikasi GESITE APP lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
77	SILUMAN APP (Seni Ilustrasi Asik dan Menyenangkan)	Aplikasi SILUMAN APP lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
78	PUSDIG PUSTARI (Pustaka Digital Perpustakaan SMP 1 Purwosari)	Aplikasi PUSDIG PUSTARI lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)
79	CHERDAS (Teacher Digital Assitant)	Aplikasi CHERDAS lingkup pelayanannya UPT	Indeks Pembangunan Manusia (IKU)

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
80	SIMENTAL (Sistem Informasi Kinerja THL)	Aplikasi SIMENTAL lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IKU)
81	GARDA TERAS DESA (GAR (Gerakan) DA (Sadar) TER (Tertib) AS (Arsip) DESA (Desa))	Aplikasi GARDA TERAS DESA lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks Profesionalitas ASN (IKU)
82	Iwak Lele (Ikrarkan Wawasan Adaptasi Kemampuan Untuk Tidak Lemot dan Bertele - Tele)	Aplikasi Iwak Lele lingkup pelayanannya Kecamatan Rembang	Indeks Profesionalitas ASN (IKU)
83	Garda Wibawa (Penegak Perda Praja Wibawa)	Aplikasi Garda Wibawa lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IKU)
84	JARING LABIRIN (Jejaring Networking Laporan Kehumasan Bagian ProKomPim Terintegrasi)	Aplikasi JARING LABIRIN lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IKU)
85	PECUT SAKTI (Pengajuan Cuti Seluruh ASN Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Aplikasi PECUT SAKTI lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IKU)
86	REKSA HARGA (Direktori Satuan Harga)	Aplikasi REKSA HARGA lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IKU)
87	"SilatTaot" (Sistem Laporan Cepat Tanggap Darurat)	Aplikasi "SilatTaot" lingkup pelayanannya Kecamatan Tukur	Indeks Resiko Bencana (IKU)
88	SI AHLI (Sistem Terpadu Pelayanan Geriatri)	Aplikasi SI AHLI lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks SPBE (IKU)
89	LUMBANG GUYUB (LUangkan Masa Bersama Nonton Gadget Gunakan Youtube Untuk Belajar)	Aplikasi LUMBANG GUYUB lingkup pelayanannya Kecamatan Lumbang	Indeks SPBE (IKU)
90	Pagerwojo Online Gaes (Pelayanan Penerbitan Pengantar SKCK dengan Digital Service System)	Aplikasi Pagerwojo Online Gaes lingkup pelayanannya Kecamatan Wonorejo	Indeks SPBE (IKU)
91	Apel Emase (Konsultasi Pelayanan dan Kegiatan Masyarakat Berbasis Elektronik)	Aplikasi Apel Emase lingkup pelayanannya Kecamatan Tukur	Indeks SPBE (IKU)
92	SIPuDing (Sistem Informasi Publikasi Data Stunting)	Aplikasi SIPuDing lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks SPBE (IKU)
93	SiLat PasSer (Sistem Laporan Pasuruan Savety Center)	Aplikasi SiLat PasSer lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks SPBE (IKU)
94	Lek Komang Nang Desa (Elektronik Rekomendasi Pengajuan Pencairan Anggaran Desa)	Aplikasi Lek Komang Nang Desa lingkup pelayanannya Kecamatan Pandaan	Indeks SPBE (IKU)
95	PUDING (Pusat Data Informasi Kecamatan Winongan)	Aplikasi PUDING lingkup pelayanannya Kecamatan Winongan	Indeks SPBE (IKU)
96	E-kordes (Elektronik Koordinasi Desa)	Aplikasi E-kordes lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks SPBE (IKU)

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
97	PMK Berbasis Digital (Perangkat Mengajar Kelas Berbasis Digital)	Aplikasi PMK Berbasis Digital lingkup pelayanannya UPT	Indeks SPBE (IKU)
98	Buku Digital JAWARA PASURUAN (Buku Digital Interaktif Berbasis Android Cakap Berbahasa Jawa dan Madura serta Budaya Pasuruan)	Aplikasi Buku Digital JAWARA PASURUAN lingkup pelayanannya UPT	Indeks SPBE (IKU)
99	Smart Notulen (DPRD Kabupaten Pasuruan Di Ujung Jari Dengan Smart Notulen)	Aplikasi Smart Notulen lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks SPBE (IKU)
100	LASKAR MASLAHAT (Layanan Kesejahteraan Sosial secara Daring untuk Kabupaten Pasuruan Maslahat)	Aplikasi LASKAR MASLAHAT lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks SPBE (IKU)
101	PASTI MASLAHAT (Portal Aplikasi Terintegrasi)	Aplikasi PASTI MASLAHAT lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks SPBE (IKU)
102	SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Aplikasi SPLP lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks SPBE (IKU)
103	SIAPA DAKU (Sistem Integrasi Pengadilan Agama dan Data Kependudukan)	Aplikasi SIAPA DAKU lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks SPBE (IKU)
104	KIOS e-PAKLADI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi Secara Elektronik di Kios)	Aplikasi KIOS e-PAKLADI lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks SPBE (IKU)
105	E-Kir Varian (Pendaftaran Online dan Pembayaran Non Tunai)	Aplikasi E-Kir Varian lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Indeks SPBE (IKU)
106	SIAP SATYA (Sistem Informasi Administrasi Pembangunan Sejahtera, Maslahat, Berdaya Saing)	Aplikasi SIAP SATYA lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Indeks SPBE (IKU)
107	INTERNET DESA GPS	Aplikasi INTERNET DESA GPS lingkup pelayanannya Kecamatan Pandaan	Indeks SPBE (IKU)
108	Siapmaslahat (Sistem Aplikasi dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik)	Aplikasi Siapmaslahat lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Nilai Investasi Daerah (IKU)
109	Tegalan Poh (Tegalan Poh Wonokerto Kecamatan Sukorejo)	Aplikasi Tegalan Poh lingkup pelayanannya Desa Wonokerto	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)
110	CARIK TAPUK SANDAL (Cara Unik Tangkap Lempuk Santai dan Handal)	Aplikasi CARIK TAPUK SANDAL lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)
111	Niku Ikan Mas (Klinik Usaha Perikanan Maslahat)	Aplikasi Niku Ikan Mas lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
112	SI - KENTO (Kentang Tosari)	Aplikasi SI - KENTO lingkup pelayanannya Kecamatan Tosari	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)
113	TLOGOMAKMUR	Aplikasi TLOGOMAKMUR lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)
114	THE JENIE (THE Jeruk Nipis)	Aplikasi THE JENIE lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)
115	THE SEMALAM (The Sedap Malam)	Aplikasi THE SEMALAM lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)
116	MANGKAS KOPI (Fermentasi Kopi)	Aplikasi MANGKAS KOPI lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Nilai PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)
117	Dasi Upik (Pendampingan Sertifikasi Usaha Pengolahan Ikan)	Aplikasi Dasi Upik lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)
118	KLINIK RATU KEMBANG (Klinik Konsultasi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Kecamatan Rembang)	Aplikasi KLINIK RATU KEMBANG lingkup pelayanannya Kecamatan Rembang	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKU)
119	"Bakmi Bang Catur" (Bayar Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Tukur)	Aplikasi "Bakmi Bang Catur" lingkup pelayanannya Kecamatan Tukur	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKU)
120	Si MAS BIJAK (Sistem Pelayanan Masyarakat Wonorejo dalam Pembayaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan)	Aplikasi Si MAS BIJAK lingkup pelayanannya Kecamatan Wonorejo	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKU)
121	JEMPOL KANDEL (Jemput Bola Pajak Pelayanan di Desa dan Kelurahan)	Aplikasi JEMPOL KANDEL lingkup pelayanannya Kecamatan Beji	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKU)
122	SIMonik (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Daerah)	Aplikasi SIMonik lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKU)
123	SENDAKKEP (Sistem Informasi Elektronik Data Kinerja dan Kepegawaian)	Aplikasi SENDAKKEP lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (IKU)
124	PASWAGE (Pasuruan Wisata Budaya dan Heritage)	Aplikasi PASWAGE lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Pendapatan Perkapita (IKU)
125	PASWAGE (Pasuruan Wisata Budaya dan Heritage)	Aplikasi PASWAGE lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Pendapatan Perkapita (IKU)
126	PUJANGGA (PU (Pustaka) JANG (Jangkau) GA (Keluarga))	Aplikasi PUJANGGA lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
127	Dambaan Satria (DAMpingi BALita (sakit) jadi ANak Sehat KuAt dan CeRIA)	Aplikasi Dambaan Satria lingkup pelayanannya Kecamatan Nguling	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
128	Sim Salabim (Dengan Sertifikat Imunisasi Satu Langkah Bina Insan Sehat Mandiri)	Aplikasi Sim Salabim lingkup pelayanannya Kecamatan Nguling	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
129	Ting Ting Jahe (Tinggalkan Stunting jadi Anak Hebat)	Aplikasi Ting Ting Jahe lingkup pelayanannya Kecamatan Nguling	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
130	RAB DARMU (Rumah Asuh Bayi Darul Mukmin)	Aplikasi RAB DARMU lingkup pelayanannya Kecamatan Sukorejo	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
131	Kebas Tingting (Kedai Balita Sehat Tinggalkan Stunting)	Aplikasi Kebas Tingting lingkup pelayanannya Kecamatan Lumbang	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
132	SIJARI (Sistem Informasi Jaringan Irigasi)	Aplikasi SIJARI lingkup pelayanannya Perangkat Daerah	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
133	La Samba Primadona (LANSIA Sehat Manfaat Berdaya Peduli Diri Masyarakat Dan Komunitas)	Aplikasi La Samba Primadona lingkup pelayanannya Kecamatan Nguling	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
134	Gerdu Alami Masalah (Gerakan Dapur Umum dan Antar Langsung Makanan Bergizi Menuju Masyarakat Lansia Sehat)	Aplikasi Gerdu Alami Masalah lingkup pelayanannya Kecamatan Lumbang	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
135	Si Pitung (Sinergi Program Intesif Terpadu Melalui IKS)	Aplikasi Si Pitung lingkup pelayanannya Kecamatan Nguling	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
136	Baby Sertif (Bayi Pulang Bawa Akta, KK, dan KIA)	Aplikasi Baby Sertif lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
137	Prasasti Sehati (Perencanaan Persalinan Risiko Tinggi, Sehat Ibu dan Bayi)	Aplikasi Prasasti Sehati lingkup pelayanannya Puskesmas Gondangwetan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
138	Selambu Perias (Selamatkan Ibu Menuju Persalinan Aman dan Sehat)	Aplikasi Selambu Perias lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
139	TEROMPAH KODHA (Temukan, Rangkul, Obati, Motivasi, Pertahankan dalam Komunitas Orang dengan HIV/AIDS)	Aplikasi TEROMPAH KODHA lingkup pelayanannya Kecamatan Grati	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
140	SERAMBI ODHA (Skrining, Rawat dan Bina ODHA)	Aplikasi SERAMBI ODHA lingkup pelayanannya Kecamatan Bangil	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
141	SEINDAH DEKAPAN IBU (Semangat Cintai ODHA Dengan Kunjungi Periksa Lanjut Ingat obati Untuk Tetap Sehat)	Aplikasi SEINDAH DEKAPAN IBU lingkup pelayanannya Kecamatan Gempol	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

No	Inovasi (sesuai SK Bupati)	Penjelasan Inovasi	IKU / IKD yang selaras
142	GEMATI TB (Gerakan Bersama Masyarakat Temukan Dan Obati Penyakit TBC)	Aplikasi GEMATI TB lingkup pelayanannya Kecamatan Prigen	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
143	PETIS (Pelayanan Obat TB di Hari Sabtu)	Aplikasi PETIS lingkup pelayanannya Kecamatan Rejoso	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
144	Getuk Manis Madu (Gerakan Turun Ke Masyarakat Untuk Pelayanan Klinis dan Ibu Hamil Terpadu)	Aplikasi Getuk Manis Madu lingkup pelayanannya Kecamatan Pohjentrek	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
145	JEBOL TB (Jemput Bola Dahak TBC)	Aplikasi JEBOL TB lingkup pelayanannya Kecamatan Winongan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
146	Brantasaurus (Berantas Tuberkulosa Untuk Perusahaan Sehat)	Aplikasi Brantasaurus lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
147	Besan Bertasbih (Bersama Santri Berantas TB)	Aplikasi Besan Bertasbih lingkup pelayanannya Kecamatan Kraton	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
148	Gasspol (Gerakan Atasi Hipertensi dan Diabetes Melitus dengan Prolanis)	Aplikasi Gasspol lingkup pelayanannya Kecamatan Kraton	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
149	Pegangan Timun Mas (Penanggulangan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)	Aplikasi Pegangan Timun Mas lingkup pelayanannya Kabupaten Pasuruan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
150	Ning Dini Pesiar (Skrining Dini Pre Eklampsia Rek)	Aplikasi Ning Dini Pesiar lingkup pelayanannya Kecamatan Kraton	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Berdasarkan tabel 3.5, perhitungan realisasi indikator 'tingkat keselarasan Inovasi daerah dengan IKU dan IKD' sebagai berikut :

$$Tk. \text{keselarasan INODA dg IKU/IKD} = \frac{150}{150} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100% atau dengan tingkat capaian 100%. Dari 150 inovasi yang ada 125 inovasi mendukung/selaras dengan IKU dan 25 inovasi mendukung/selaras dengan IKD. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi daerah sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah.

Inovasi daerah yang dikembangkan menjadi alat pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mencapai angka 67,70 dengan predikat 'Sangat Inovatif'.

Beberapa penghargaan berkaitan dengan inovasi daerah yang diperoleh tahun 2024 pada penyelenggaraan Inotek Award dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

- Top 10 Inovasi “ Stroke Holistik’ RSUD Bangil
- Terinovatif VI Inovasi “ CHERDAS” oleh SMPN 2 Pandaan
- Terinovatif IV Inovasi PEMPES oleh Desa Randupitu Kec. Gempol
- Top 10 Kepala Bappeda/Bapperida Terinovatif.

F. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Penilaian tahun 2024 atas SAKIP Bappelitbangda sebagai berikut:

No	Komponen SAKIP	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Kinerja	25	20
	Nilai SAKIP	100	84,95

Berdasarkan hasil tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 85, maka target tidak tercapai atau dengan capaian 99,94%. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP didukung oleh tersedianya dokumen pendukung SAKIP antara lain :

1. Laporan Kinerja
2. Rencana Strategis
3. Rencana Kerja
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
5. Perjanjian Kinerja
6. Rencana Aksi
7. Laporan Kinerja

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Dua Tahun Sebelumnya

Perkembangan realisasi kinerja Bappelitbangda tahun 2022-2024 tersaji dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Kinerja Bappelitbangda
Tahun 2022-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Sat	2022	2023	2024
1	Tujuan Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	-	24,17	24,18	24,04
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	-	24,26	24,32	23,97
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	Indikator 1.a: Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%			95,36
		Indikator 1b Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	%	n/a	n/a	105,86
		Indikator 1c Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	%	36,61	n/a	25
		Indikator 1d Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	%			97,50
1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	%	n/a	n/a	100
1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	-	84,79	84,60	84,95
		<i>Perencanaan kinerja (30)</i>	-	28,39	23,10	27,60
		<i>Pengukuran kinerja (30)</i>	-	21,67	27,00	24,60
		<i>Pelaporan kinerja (15)</i>	-	12,86	13,50	12,75
		<i>Evaluasi kinerja (25)</i>	-	21,87	21,00	20,00

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2024-2026 menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja jangka menengah pada tahun 2024 atau pada tahun pertama periode 2024-2026. Hal ini menjadi acuan mengidentifikasi rumusan strategi yang tepat pada tahun-tahun berikutnya agar target akhir jangka menengah dapat tercapai dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 terhadap
Target Akhir Renstra 2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024 (th pertama)	Capaian s/d tahun 2024
Tujuan : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	25,69	24,04	93,58%
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	25,40	23,97	94,37%
Sasaran 1 : Meningkatnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	Indikator 1.a: Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	95,36	95,36%
	Indikator 1b Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah (%)	100	108,45	108,45%
	Indikator 1c Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target (%)	36	25,90	128,06%
	Indikator 1d Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah (%)	100	97,50	97,50%
Sasaran 2: Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD (%)	100	100	100,00%
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	88	84,95	96,53%

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dirumuskan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Beberapa indikator di tahun 2024 realisasinya telah mencapai/melebihi target akhir renstra 2024-2026, sehingga dalam penetapan target tahun berikutnya (2025) diperlukan penyesuaian atau tidak lagi mengacu pada renstra. Indikator tersebut yaitu : persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target.
2. Beberapa indikator perlu dilakukan upaya ekstra keras untuk tahun berikutnya, utamanya untuk indikator yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator tersebut yaitu: nilai sakip pemda komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja).

Beberapa catatan hasil Evaluasi Penilaian SAKIP Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PAN/RB tahun 2024 pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yaitu :

1. Perencanaan Kinerja:
 - a. Terjadi penurunan kualitas perencanaan kinerja periode 2024-2026, masih terdapat rumusan tujuan dan sasaran pada dokumen perencanaan kinerja baik tingkat pemerintah daerah maupun PD yang belum berorientasi hasil, serta

penetapan indikator kinerja belum SMART (Specific, Measurable, Achievement, Relevant dan Time Bound) yang cukup dalam mengukur sasaran yang ingin diwujudkan

- b. Masih ditemukan penetapan target kinerja yang belum sepenuhnya baik pada dokumen perencanaan kinerja tingkat pemerintah daerah dan beberapa PD
- c. Rencana Aksi yang hanya menampilkan jadwal pelaksanaan tanpa menggambarkan target kinerja yg dicapai dalam triwulanan
- d. Penyusunan pohon kinerja masih belum tergambar baik pada renstra perangkat daerah maupun perencanaan kinerja strategis daerah, serta penjenjangan kinerja belum dapat memenuhi prinsip logis sebab akibat dan belum berhasil menguraikan outcome antara yaitu intermediate outcome dan immediate outcome dengan baik.
- e. Belum adanya bentuk identifikasi crosscutting kinerja di tingkat daerah maupun PD

2. Pengukuran Kinerja:

- a. Dokumen IKU masing-masing PD belum disertai dengan definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data atas setiap indikator kinerja dengan memadai, sehingga belum dapat dipastikan substansi dan kesesuaian setiap indikator kinerja.
- b. Aplikasi SIMONEVA yang dikembangkan masih belum optimal, monev belum berjenjang untuk memastikan keandalan data dan capaian kinerja yang dilaporkan.
- c. Pengukuran kinerja di lingkup Pemkab Pasuruan belum dihubungkan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi setiap PD

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dengan Realisasi Provinsi /Standar Nasional.

Indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan yang dapat diperbandingkan dengan realisasi Provinsi Jatim dan standar nasional yaitu indikator yang berkaitan dengan penilaian implementasi AKIP tingkat pemda, karena baik penilaian provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan oleh KemenPAN-RB. Sedang penilaian AKIP pada level PD dilakukan oleh Inspektorat Daerah masing-masing Pemda. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel 3.8. Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan (gap) yang cukup lebar dengan standar nasional. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja di level pemerintah daerah dan perangkat daerah masih belum baik atau memenuhi norma-norma yang ditentukan oleh KemenPAN-RB. Catatan-catatan penting atas kekurangan

tersebut sebagaimana hasil evaluasi KemenPAN-RB yang diuraikan pada subbab sebelumnya.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan dengan Realisasi Kinerja Propinsi Jawa Timur dan Standar Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi	Realisasi	Ket.	
	KemenPAN-RB	Prov Jatim	Bappelitbangda Kab. Pasuruan	Gap thd Standar Nasional	Gap thd Prov Jatim
		2024	2024	(+/-)	(+/-)
Nilai SAKIP Pemda Komponen Perencanaan	30	n/a	24,04	5,96	-
Nilai SAKIP Pemda Komponen Pengukuran	30	n/a	23,97	6,03	-

3.1.5 Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan uraian pada subbab-subbab sebelumnya dapat diketahui indikator kinerja yang mencapai/tidak mencapai target dan atau mengalami peningkatan/penurunan. Rekapitulasi kondisi tersebut beserta analisis keberhasilan/kegagalan disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 Dan Upaya yang Telah Dilakukan

No	Indikator Kinerja	Capaian Target 2024	Tren Realisasi 2022-2024	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	96,46% (tdk tercapai)	Turun	<ul style="list-style-type: none"> - pohon kinerja belum tersusun dengan baik terutama dalam mengidentifikasi intermediate dan immediate outcome serta belum menunjukkan crosscutting - penentuan target pada dokumen rencana jangka menengah belum menantang.
	Upaya yang telah dilakukan : melakukan verifikasi/pendampingan dokumen perencanaan kinerja (pokin, renja, perjanjian kinerja dan rencana aksi)			
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	96,57% (tdk tercapai)	Turun	<ul style="list-style-type: none"> - Formula dan definisi operasional IKU belum jelas dan spesifik - Perhitungan realisasi indikator kinerja belum didukung sistem tata kelola data yang baik sehingga keakuratan pengukuran kinerja masih diragukan.
	Upaya yang telah dilakukan : (-) melakukan revisi SK Bupati tentang IKU Pemda dan IKU Perangkat Daerah ; (-) melakukan koordinasi dalam Tim SAKIP Kabupaten beserta Dinas Kominfo untuk mengembangkan e-sakip dan koordinai dalam Tim/Forum Satu Data Kabupaten untuk mengembangkan portal satu data kabupaten			

No	Indikator Kinerja	Capaian Target 2024	Tren Realisasi 2022-2024	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
3	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	95,36% (tdk tercapai)	(data th 2024 saja)	<ul style="list-style-type: none"> – Belum ada pembagian secara konsisten mitra perangkat daerah untuk masing-masing petugas verikator Bappelitbangda serta belum ada pejabat yang ditunjuk sebagai supervisor pelaksanaan verikasi dokren PD. – Beragamnya kemampuan teknis petugas verifikator Bappelitbangda
Upaya yang telah dilakukan : (-) membuat SK verifikator, supervisor dan mitra PD dalam pelaksanaan verifikasi dokren PD beserta SOPnya; (-) melakukan bimtek untuk tenaga fungsional dan strutural tentang perencanaan (-) melakukan pertemuan/diskusi yang melibatkan semua perencana dan kabid membahas tentang tema tertentu dan isu/tugas aktual.				
4	Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	108,45% (tercapai)	(data th 2024 saja)	<ul style="list-style-type: none"> – Pemantauan pencapaian IKU dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah dilakukan setiap triwulan melalui aplikasi Simoneva
5	Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	129,62% (tercapai)	Naik	
Upaya yang telah dilakukan : melakukan verifikasi atas inputan Simoneva oleh PD untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data kinerja				
6	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	97,50% (tdk tercapai)	(data th 2024 saja)	<ul style="list-style-type: none"> – Pemutakhiran nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dimungkinkan dimutakhirkan setiap tahun oleh Kemendagri, sehingga berpotensi pada ketidakkonsistensian antara dokren jangka menengah dan tahunan.
Upaya yang telah dilakukan : meminta PD melakukan pemetaan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan beserta indikatornya pada dokumen renja PD				
7	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	100% (tercapai)	(data th 2024 saja)	<ul style="list-style-type: none"> – Setiap pengajuan inovasi dilengkapi dengan dokumen proposal/profil inovasi yang antara lain memuat dampak/manfaat yang diperoleh dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah
Upaya yang telah dilakukan : melakukan pendampingan/desk dalam penyusunan dokumen pengajuan/proposal inovasi yang akan dilaporkan atau diinput ke aplikasi IGA kemendagri				
8	Nilai SAKIP OPD	99,94% (tdk tercapai)	Naik	<ul style="list-style-type: none"> – Belum ada manajemen/tata kelola data kinerja perangkat daerah secara baik sehingga data realisasi kinerja kurang akuntabel
Upaya yang telah dilakukan :menyusun kertas kerja perhitungan IKU dalam format exel secara sederhana sehingga mudah diaplikasikan				

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya personil, pembiayaan (anggaran) serta sarana dan prasarana. Dalam penggunaan anggaran Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan melaksanakan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yaitu tujuan dan sasaran sesuai renstra PD. Efisiensi penggunaan anggaran/dana dsajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ket	
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	100%	96,5%	96,5%	2.003.369.765	1.947.221.179	97,20%	95,5%	Cukup efisiensi	
				Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	100%	100%	100%						
				Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PERSIK yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah yang baik dan berkualitas	100%	89,28%	89,28%						
				Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	100%	100%	100%						
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah (%)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan	75%	75%	75%	2.892.611.500	2.445.990.699	84,56	110%		Sangat efisiensi
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target		Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	100%	100%	100%						
		Tingkat keselarasan antar dokrenda		Persentase Data dan informasi perencanaan perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi	65%	65%	65%						
				Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%						

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
2	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	100%	100%	100%	1.382.378.700	1.359.087.649	98,32%	86,45%	Tidak efisiensi
				Tingkat kematangan inovasi daerah	70	70	70					
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KAB/ KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	100%	100%	8.733.972.408	8.118.359.975	92,95%	107,58%	Efisiensi
JUMLAH								15.012.332.373	13.870.659.502	94.40	5,6%	

Efisiensi Anggaran :

1. Indikator Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dan PERSIK yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM dan PERSIK dengan efisiensi anggaran 95,5%, dengan kategori “cukup efisiensi” hal tersebut karena kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi.
2. Persentase usulan stakeholder yang berpartisipasi dalam proses perencanaan, Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi, Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan, Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan efisiensi 110% dengan kategori sangat efisiensi karena beberapa kegiatan terlaksana dengan baik dalam rangka mendukung Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, kegiatan Penyusunan Penetapan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029.
3. Persentase Persentase hasil riset yang diterapkan dan Tingkat kematangan inovasi daerah dengan efisiensi 86,45 kategori “tidak efisiensi”, seluruh kegiatan penyusunan dokumen kajian penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan sesuai target dengan anggaran yang cukup dimulai dari penyusunan dan kegiatan Lomba Inovasi Daerah berjalan dengan baik, untuk menjaring Inovasi-inovasi dari masyarakat.
4. Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan efisiensi sebesar 107,5% dengan kategori “efisiensi” dikarenakan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai setor kembali tinggi, namun sub kegiatan yang lainnya dalam pelaksanaannya telah melampaui target, dengan anggaran sesuai kebutuhan.

3.1.7 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Berdasarkan uraian data kinerja dan keberhasilan/kegagalan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan pada subbab-subbab sebelumnya dapat dirumuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bappelitbangda dilaksanakan berkelanjutan baik melalui bimtek maupun diskusi internal dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi serta pemanfaatan riset dan inovasi.

2. Pendampingan kepada perangkat daerah, uniit kerja, lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat dalam meningkatkan inovasi daerah yang mendukung kinerja pemerintah daerah.
3. Peningkatan pengelolaan/manajemen data kinerja Bappelitbangda dengan sistem yang lebih baik.
4. Peningkatan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Keterbukaan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholder/Masyarakat/dunia usaha/industri dalam rangka pendukung capaian IKU dan IKD antara lain pengelolaan CSR dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan karena terbatasnya kapasitas riil anggaran daerah atau APBD.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Bappelitbangda tahun 2024 sebesar Rp.15.013.332.373,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.870.659.502,00 atau tercapai 92,40% dengan rincian sebagaimana tabel 3.11.

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Bappelitbangda Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Reali sasi	%	Target	Realisasi	%
PERENCANAAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase dokumen/lapora n administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	%	100	100	100	8.733.972.408	8.118.359.975	92,95
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Persen	8	8	100	217.088.700	209.895.750	96,69
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang disusun	dok	5	5	100	64.699.000	64.119.000	99,10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap capaian kinerja & ikhtisar realiasi kinerja SKPD	laporan	2	2	100	149.908.000	143.528.000	95,74
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi perangkat daerah	dokumen	2	2	100	2.481.700	2.248.750	90,61

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Persen	100	100	100	6.637.412.208	6.153.273.024	92,71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	532	532	100	6.126.593.712	5.692.631.122	92,92
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang/bulan	144	144	100	394.238.496	349.701.902	88,70
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang/bulan	96	96	100	116.580.000	110.940.000	95,16
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	100	49.000.000	48.993.093	99,99
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	unit	7	7	100	49.000.000	48.993.093	99,99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Persen	50	50	100	178.500.000	172.757.000	96,78
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	100	178.500.000	172.757.000	96,78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	Persen	100	100	100	821.816.200	765.388.523	93,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	12	12	100	25.969.000	21.581.900	83,11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jenis-kali	12	12	100	60.371.200	53.492.200	88,61
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	jenis-kali	12	12	100	88.076.000	45.901.000	52,12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	eksemplar	12	12	100	12.000.000	11.880.000	99,00

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	45	100	635.400.000	632.533.423	99,55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Persen	100	100	100	300.567.000	277.400.000	92,29
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	20	20	100	300.567.000	277.400.000	92,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Persen	100	100	100	156.495.000	121.913.980	77,90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	156.495.000	117.113.980	74,84
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100	4.800.000	4.800.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	Persen	100	100	100	373.093.300	368.738.605	98,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	20	20	100	302.298.800	301.961.605	99,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	20	20	100	15.550.000	12.125.000	77,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	83	83	100	55.244.500	54.652.000	98,93

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan	Persen	100	100	100	2.892.611.500	2.445.990.699	84,56
	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	Persen	100	100	100			
	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi	Persen	60	60	100			
	Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan perencanaan yang tepat waktu	Persen	28	28	100	2.604.546.000	2.202.442.083	92,59
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100	203.726.000	185.214.500	90,91
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	100	217.587.000	138.092.000	63,47
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100	592.394.000	342.284.000	57,78
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	dokumen	24	24	100	65.700.000	62.723.000	95,47
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	dokumen	4	4	100	1.525.139.000	1.474.128.583	96,66
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	93.101.000	68.760.616	73,86

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	1	1	100	93.101.000	68.760.616	73,86
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jenis data/informasi yang terisi pada aplikasi Simoneva	Persen	100	100	100	194.964.500	174.788.000	89,65
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1	1	100	151.933.000	148.448.000	97,71
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	5	100	43.031.500	26.340.000	61,21
POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah	Persen	100	100	96,5	2.003.369.765	1.947.221.179	97,20
	Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	Persen	100	100	100			
	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PERSIK yang baik dan berkualitas dengan dokumen perencanaan pemb daerah yang baik dan berkualitas	Persen	100	90,53	90,53			
	Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	Persen	100	100	100			
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang PPM yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	Persen	100	96,5	96,5	853.569.995	825.458.884	96,59

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	66	66	100	52.540.195	52.042.314	99,05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	66	66	100	118.765.400	117.755.394	99,15
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	9	1	11,11	117.610.200	117.177.371	99,63
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	14	14	100	48.498.200	48.179.958	99,34
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	14	100	106.170.000	104.440.660	98,37
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	7	9	128,57	409.986.000	385.863.187	94,12
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen dan laporan koordinasi, Asistensi dan Monev PD Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	92,5	92,5	558.663.700	544.050.050	92,50

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	8	8	100	15.975.000	15.317.300	95,88
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	8	100	85.983.000	79.093.378	91,99
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	dokumen	4	2	50	20.205.000	19.856.500	98,28
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	8	8	100	13.547.000	13.413.000	99,01
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	8	100	116.901.000	110.915.937	94,88
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	dokumen	4	3	75	306.052.300	305.453.575	99,80
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	Persen	100	88,57	88,57	116.901.000	110.915.937	88,57
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dokumen	10	10	100	18.827.900	18.547.900	98,51

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	10	10	100	142.095.600	135.820.000	95,58
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	5	2	40	110.997.870	110.283.700	99,36
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid Kewilayahan	dokumen	4	4	100	11.667.300	11.211.800	96,10
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4	4	100	60.928.000	60.483.897	99,27
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	dokumen	2	1	50	246.619.400	241.264.948	97,83
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan	Persen	100	100	100	1.382.378.700	1.359.087.649	98,32
	Tingkat kematangan inovasi daerah		70	70	100			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	100	100	100	415.000.000	412.663.100	99,44
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	dokumen	3	3	100	415.000.000	412.663.100	99,44

PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bid Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	100	100	596.791.500	591.727.000	99,15
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	dokumen	3	3	100	596.791.500	591.727.000	99,15
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi	Persen	100	100	100	370.587.200	354.697.549	95,71
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0	0	0	75.377.900	71.539.816	94,91
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	dokumen	2	2	100	295.209.300	283.157.733	95,92
JUMLAH						15.012.332.373	13.870.659.502	92,40

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab 3 tentang akuntabilitas kinerja Sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja atas target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 rata-rata sebesar 102,99% dengan rincian:
 - Nilai SAKIP komponen perencanaan, capaian 96,
 - Nilai SAKIP komponen pengukuran, capaian 96,57%.
 - Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, capaian 95,36%.
 - Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah, capaian 108,45%
 - Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target, capaian 129,62%
 - Tingkat keselarasan antar dokrenda, capaian 97,50%.
 - Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD, capaian 100%
 - Nilai SAKIP PD, capaian 99,94%.
2. Perkembangan kinerja Bappelitbangda tahun 2022-2024 sebagai berikut:
 - Nilai SAKIP komponen perencanaan, tren turun.
 - Nilai SAKIP komponen pengukuran, tren turun.
 - Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tren – (data tahun 2024 saja)
 - Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah, tren – (data tahun 2024 saja)
 - Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target, tren naik.
 - Tingkat keselarasan antar dokrenda, tren – (data tahun 2024 saja)
 - Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD, tren – (data tahun 2024 saja)
 - Nilai SAKIP PD, tren naik.

4.2 Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan dan analisis kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 atas laporan kinerja dapat dirumuskan rekomendasi untuk perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bappelitbangda dilaksanakan berkelanjutan baik melalui bimtek maupun diskusi internal dalam rangka menunjang

pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan daerah (termasuk pendampingan perencanaan perangkat daerah), pengendalian, dan evaluasi serta pemanfaatan riset dan inovasi, yang dilakukan secara sinergi dengan perangkat daerah.

2. Pendampingan kepada perangkat daerah, unit kerja, lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat dalam meningkatkan inovasi daerah yang mendukung kinerja pemerintah daerah.
3. Peningkatan pengelolaan/manajemen data kinerja Bappelitbangda dengan sistem yang lebih baik.
4. Peningkatan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Hilirisasi perencanaan pembangunan daerah sampai pada pelaksanaan pembangunan untuk memastikan program prioritas pembangunan daerah dapat dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Upaya hilirisasi perencanaan antara lain melalui optimalisasi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan karena terbatasnya kapasitas riil anggaran daerah atau APBD.

Operasionalisasi seluruh rangkaian rekomendasi tersebut ditentukan oleh komitmen bersama baik secara eksternal dengan pemangku kepentingan, maupun internal Bappelitbangda mulai dari Pimpinan, pejabat struktural, fungsional, hingga staf pelaksana. Dengan komitmen yang kuat dan konsisten dalam penyusunan perencanaan, maka akan terwujud perencanaan yang efektif dan akuntabel serta berkelanjutan.

Pasuruan, 31 Desember 2024



KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASURUAN

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM**

Jabatan : KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. PASURUAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM.**

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 24 September 2024

Pj. BUPATI PASURUAN

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	- -	24,92 24,82
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan yg terintegrasi dan efektif	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	Persen	100
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	Persen	36,80
		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	Persen	100
2.	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	Persen	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	-	86

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.003.369.765	P- APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.892.611.500	P- APBD
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 1.382.378.700	P- APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.738.772.408	P- APBD
	TOTAL	Rp. 15.017.132.373	

Pasuruan, 24 September 2024

Pj. BUPATI PASURUAN



Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19741031 199311 1 001

Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan berikut Matrik Tindak lanjut dari LHE SAKIP 2024, dengan beberapa perbaikan yang sedang dan dilaksanakan oleh Bappelitbangda

Tabel 1.7
Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Meninjau Ulang serta melakukan koreksi atas beberapa penulisan redaksi pada tiap-tiap dokumen perencanaan antara lain Renstra Renja, Perjanjian Kinerja sampai LAPORAN KINERJA	Membuat Matrik keselarasan antara Renstra, Renja, PK dan LAPORAN KINERJA	Matrik keselarasan antara Renstra, Renja, PK dan LAPORAN KINERJA	Nopember 2024	JF Perencana	Selesai
2.	Hendaknya dalam melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi e SAKIP)	Penyusunan Monev capaian Kinerja pada aplikasi SIDAREN	Laporan Capaian Kinerja pada aplikasi SIDAREN	Desember 2024	JF Perencana	Proses

jl. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kelemahan dalam implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan 2024 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
			Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit

4.	B	>60-70	perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	27,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	27,00	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	12,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,60	84,95

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, namun masih terdapat beberapa kesalahan penulisan/redaksi pada dokumen LKjIP Tahun 2023, sebagai contoh berikut:
Pada LKjIP Tahun 2023 untuk indikator sasaran "Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah" indikator sasaran sesuai IKU seharusnya " Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan" namun tertulis "Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti"
- b. Terdapat mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja namun belum memanfaatkan Teknologi informasi (aplikasi).

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Meninjau ulang serta melakukan koreksi atas beberapa kesalahan penulisan/redaksi pada tiap-tiap dokumen perencanaan antara lain pada Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja sampai dengan LKjIP.
- b. Hendaknya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP).

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 84,95 dengan kategori A (Memuaskan), yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.



Pemberian Penghargaan Kategori Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri RI.



Pemberian Penghargaan dari Pj Gubernur Jawa Timur